KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Presiden: Agus Subiyanto Penuhi Semua Aspek
Tanggal : Kamis, 02 November 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PERGANTIAN PANGLIMA TNI

Presiden: Agus Subiyanto Penuhi Semua Aspek

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengatakan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto telah memenuhi semua aspek yang dibutuhkan untuk menjadi Panglima TNI. Tak hanya memiliki kemampuan akademis, perwira TNI yang baru satu pekan diangkat menjadi KSAD itu juga dinilai punya jam terbang tinggi dalam memimpin teritorial.

"Beliau ini, kan, Wakil KSAD, kemudian menjadi KSAD. Tetapi, kalau melihat jam terbangnya, saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis, semuanya memenuhi," ujar Presiden seusai meninjau proyek pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Presiden telah mengusulkan Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (30/10). Usulan itu diajukan hanya berselang lima hari setelah Agus dilantik menjadi KSAD.

Sebelum menjabat KSAD, Agus merupakan Wakil KSAD. Ia juga tercatat pernah menjabat sejumlah posisi, antara lain, Pangdam III/Siliwangi, Komandan Paspampres, dan Danrem 061/Surya Kencana.

Dalam surat presiden yang diterima DPR disebutkan bahwa Agus diusulkan untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono. Yudo yang menjabat sebagai Panglima TNI sejak 19 Desember 2022 akan memasuki masa pensiun pada akhir November ini.

Ketua DPR Puan Maharani seusai rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun 2023-2024 menyampaikan, akan segera memproses usulan pergantian Panglima TNI yang diusulkan Presiden.

Merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Persetujuan dimaksud disampaikan paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR. Jika DPR tidak menyetujui calon yang diusulkan, Presiden bisa mengusulkan satu calon lain sebagai pengganti.



KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo (kanan) menyematkan tanda kenaikan pangkat kepada Jenderal Agus Subiyanto seusai dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Presiden mengajukan Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih Panglima TNI. Pemilihan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kualifikasi kepangkatan, kepemimpinan, profesionalisme, rotasi antarmatra, dan kebutuhan strategis pertahanan negara.

Sementara itu, untuk posisi KSAD yang nantinya akan ditinggalkan Agus, Presiden belum memutuskan. Presiden masih menunggu persetujuan DPR terkait pencalonan Agus sebagai Panglima TNI.

"Ya, belum, satu-satu. Ini, kan, memperoleh persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Baru setelah ada persetujuan, kita berpikir KSAD yang baru," tambahnya.

Jaga netralitas

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Tubagus Hasanuddin, meminta agar Panglima TNI dan KSAD yang baru kelak memedomani aturan perundang-undangan yang ada, termasuk menjaga netralitas. Sebagai aparatur negara, Panglima TNI dan KSAD tidak boleh berpolitik praktis, apalagi terlibat dalam dukung-mendukung di Pemilu 2024.

"Ya, saya tetap meminta siapa pun yang menjadi Panglima TNI dan siapa pun menjadi KSAD atau siapa pun yang menjadi prajurit TNI dan masih aktif harus netral dan tidak berpolitik praktis. Rakyat akan mengawasinya. Itu penting," ujarnya.

Antisipasi kerawanan

Menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, Polri mengantisipasi potensi kerawanan keamanan dan ketertiban Pemilu 2024. Polri akan memperhatikan indeks kerawanan, baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Badan Intelijen Negara (BIN).

"Tentunya dua-duanya kami perhatikan. Meski demikian kami kembalikan kepada wilayah (kepolisian) masing-masing untuk melakukan *mapping* ataupun identifikasi berdasarkan data yang ada ditambah dengan data terbaru," kata Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Rabu.

Pemetaan salah satunya dilakukan untuk mengetahui tingkat kerawanan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Pemetaan itu juga diperlukan sebagai dasar untuk menentukan jumlah personel yang ditempatkan di TPS, sesuai dengan tingkat kerawanannya.

Polri, lanjut Listyo, akan bekerja sama dengan TNI untuk menjaga keamanan di wilayah-wilayah rawan pada pemungutan suara nanti. "Khususnya juga wilayah di DOB (daerah otonom baru) yang tentunya menjadi perhatian khusus dan harus bisa terselenggara pilkada nanti sehingga pemerintahan baru di empat DOB bisa terpenuhi," ujar Listyo.

Polri juga mengantisipasi ancaman teroris selama pemilu. Listyo mengungkapkan, Densus 88 Antiteror Polri setiap saat terus memonitor pergerakan kelompok-kelompok jaringan teroris yang memang selama ini selalu dipantau.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya mengantisipasi para penyelenggara pemilu mengalami kelelahan. Dengan demikian, peristiwa meninggalnya 894 petugas penyelenggara pemilu pada 2019 tidak terulang kembali.

"Sekarang sudah dipetakan bagaimana agar mereka tidak mengalami hal (meninggal dan sakit saat bertugas pada pemilu) itu," kata Wapres.

(INA/WKM/CAS/NIA)